

Kepemimpinan Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Hubertus Oja¹, Welsen Bagasu², Samuel. W. Ririhena³
¹²³ Universitas Musamus Merauke
email: oja@unmus.ac.id

(Diterima Maret 2024; Disetujui Maret 2024; Dipublikasikan Maret 2024)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepemimpinan kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kampung Wasur, Kabupaten Merauke. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data berupa penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian kepemimpinan kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung Di Kampung Wasur belum berjalan secara efektif dalam menjalankan roda pemerintahan kampung. Hal ini terlihat dari indikator menggerakkan potensi masyarakat bahwa hanya sebatas pada pemberian pelatihan yang sifatnya terbatas baik dari segi waktu dan juga biaya, Untuk indikator melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya bahwa Kepala kampung Wasur belum sepenuhnya mejanjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan selaku kepala kampung jarang berada di kantor sehingga agak sulit untuk menjalankan tugasnya dalam urusan-urusan pemerintah kampung baik urusan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat maupun urusan lainnya yang dipercayakan kepadanya termasuk urusan pembangunan. Untuk indikator melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintah kampung bahwa Kepala Kampung masih kurang melakukan koordinasi kegiatan pembangunan ditingkat kampung dan belum mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang ada di tingkat Kampung Wasur.

Kata Kunci: *Kepemimpinan; Kepala Kampung; Pemerintahan Kampung*

Abstract

This study aims to describe the leadership of the village head in the implementation of village government in Wasur Village, Merauke Regency. Data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation, Data analysis techniques in the form of data presentation, data reduction, and conclusion assessment The results of research on village head leadership in the implementation of village government in Wasur Village, Merauke District have not run effectively in running the village government. This can be seen from the indicators of mobilizing community potential that it is only limited to providing training which is limited both in terms of time and cost, because so far the training has only been aimed at rice farmers and also the managing community. For indicators of the duties of his superior government, the Head of Wasur Village has not fully carried out the duties and responsibilities given to him as the village head, where so far the head of Wasur Village has rarely been in the office, so it is rather difficult to carry out his duties in village government affairs, both development and empowerment matters to the community and other matters entrusted to him, including development affairs. For the indicator to coordinate the running of the village government, the Village Head still lacks coordination of development activities at the village level and has not optimized all potential development resources, starting from the stages of planning, implementing, supervising, and maintaining development results at the Wasur Village level.

Keywords: *leadership; Village Coconut; Village Government.*

PENDAHULUAN

Kampung lebih mempermudah pemahaman kita, maka akan di acuh suatu defenisi yang kiranya mampu menjadi landasan untuk membahas konsep kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut atau bawahan yang mengingatkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya. Seperti apa yang dihadapi oleh *corsair communication*, saat ini kenyataan yang di hadapi oleh organisasi dan kepemimpinan sangat banyak perbedaan dengan apa yang di hadapi beberapa waktu lalu. Saat ini pemimpin dan organisasi di hadapkan pada perubahan yang cepat, kompetisi yang ketat, globalisasi, perampingan organisasi, perubahan, ekonomi, sosial dan kondisi pemerintahan. Pemimpin dan organisasi dihadapkan pada tantangan yang lebih berat akibat kemajuan teknologi yang cepat, diregulasi, kebijakan pemerintah yang terbuka, sampai kompleksnya masalah ketenaga kerjaan.

Kampung patut di lindungi dan di jaga keasliannya yang mana adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam berlangsungnya perkembangan Kampung tidak terlepas dari peran masyarakat serta kepemimpinan kepala Kampung dan perangkat Kampung yang ada pada kampung Wasur. mana semua peran dari aparat pemerintah kampung maupun masyarakat amat penting dalam proses pembangunan desa. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap masyarakat adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.(UU Desa Nomor.6 tahun 2014). Dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 mengacu pada dua pola pendekatan yaitu kampung membangun dan “membangun kampung yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan kampung merupakan suatu proses yang berlangsung di kampung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembanguan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, dalam pemerintahan indonesia di canangkan berbagai program di antaranya seperti program inpres kampung tertinggal, program pembangunan infra struktur pedesaan, program alokasi dana kampung, dan sebagainya. Semua program khusus ini bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan di daerah pedesaan. Dalam kajian ini penulis mengupas tentang hal-hal yang menjadi permasalahan di dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam kaitannya dengan pembangunan kampung yang secara khususnya Pembangunan di Kampung Wasur yang mana di kampung tersebut ditemukan permasalahan pembangunan yang masih belum terselesaikan , padahal pembangunan yang telah berjalan itu telah di mulai dari sejak lama,

Kepemimpinan merupakan sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka menyakinkan yang dipimpinnnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang

dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, yang mana dalam kepemimpinan Kepala Kampung amat sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan dikampung.

Peran kepemimpinan sangat strategis dan penting bagi pencapaian misi, visi dan tujuan suatu organisasi, Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi. Pemimpin memegang peran kunci dalam memformulasikan dan mengimplementasikan strategi organisasi. Setiap pemimpin berkewajiban memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk membina, menggerakkan, mengarahkan semua potensi karyawan di lingkungannya agar dapat menimbulkan kepuasan dan komitmen organisasi, pembagian kerja sesuai dengan keahlian para pegawai sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja yang tinggi. Organisasi yang berhasil dalam mencapai tujuan serta mampu memenuhi tanggung jawab sosialnya akan sangat tergantung pada para pimpinan.

Menurut Triantoro Safaria, (2004), menyatakan bahwa strategi implementasi kepemimpinan melalui mekanisme spesifik, teknik-teknik, alat-alat untuk mengarahkan sumber daya organisasi mencapai tujuan strategi dan dapat di capai secara efektif. Dari latar belakang di atas maka tujuan dari kajian penelitian ini yakni untuk menganalisis Kepemimpinan Kepala Kampung Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung di Kampung Wasur Kabupaten Merauke.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif data yang telah terkumpul sebagaimana mestinya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Senada ditegaskan oleh Baswori & Suwandi. (2008). Bahawa pendekatan deskriptif digunakan untuk mengkaji suatu kejadian atau fenomena, kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam hubungan dengan penelitian berusaha untuk mengkaji dan deskripsikan tentang Kepemimpinan Kepala Kampung Dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kampung Wasur Kabupaten Merauke. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data digunakan menurut Miles dan Huberman Sugiyono (Sugiyono,2011) dengan menggunakan pola interaktif berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 26 tentang Kepala Desa pada Ayat 1 menegaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara pada ayat 2 pasal 26 menegaskan bahwa Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;. Kewenangan tersebut merupakan bentuk kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Kampung yang dilandasi pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam peneliti untuk menganalisis kepemimpinan kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung, di Kampung Wasur, adapun indikator yang digunakan, yaitu:

1. Menggerakkan potensi masyarakat

Pembinaan Masyarakat. Mengingat kedudukan yang penting dalam kampung adalah masyarakat, Masyarakat senantiasa dituntut berpartisipasi dalam pembinaan kesadaran dalam meningkatkan potensi kampung wasur, Masyarakat kampung wasur memiliki hubungan sosial lebih luas dari pada pemerintah kampung, hal ini dapat dilihat dari pengetahuan, pemahaman dan ketaatan Masyarakat meyakini kepercayaan pemerintahan kampung dalam kepemimpinnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk potensi yang ada pada masyarakat Kampung Wasur memiliki beragam potensi baik dari potensi alam, pertanian berupa padi, perkebunan, maupun dari potensi usaha kecil berupa batu bata, namun belum di kembangkan dengan baik semunaya masih bergantung dengan kondisi alam, upaya selama ini dilakukan oleh pemerintah kampung melalui kepala kampung dalam menggerakkan potensi kampung dan potensi masyarakat kampung hanya sebatas pada pemberian pelatihan yang sifatnya terbatas baik dari segi waktu dan juga biaya,

Selama ini pelatihan hanya ditujukan kepada petani padi dan juga masyarakat pengelolah sarang semut namun tidak rutin dilakukan. Oleh karena pemerintah kampung melalui kepala kampung harus mengidentifikasi dulu potensi yang ada di Kampung Wasur baru menyusun program kerja pembangunan kampung. Kepemimpinan kampung masih kurang menjalankan tugasnya dengan baik untuk memajukan pembangunan dan juga perekonomian masyarakat Kampung Wasur. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kepala kampung Wasur sebagai pemimpin pemerintah di tingkat kampung harus mampu menggerakkan semua potensi yang ada karena Kampung Wasur sendiri memiliki berbagai potensasi misalnya: potensi alam sebagai destinasi wisata, potensi lokal masyarakat antara lain pertanian dan perkebunan, Kayu bakar, Batu bata semuanya bisa dioptimalkan untuk mendukung pembangunan masyarakat kampung. Kepala kampung harus mampu mengendalikan perilaku masyarakat Kampung wasur dalam memanfaatkan semua potensi yang ada. Kepatuhan warga kepada pemimpin karena kepala kampung dipandang sebagai pengembang amanat hingga apa yang diucapkan kepala kampung akan dipatuhi termasuk pengendalian konflik, sehingga kepercayaan antara masyarakat dan pemimpin selalu terjaga. Potensi alam dan budaya yang dimiliki memberikan dampak positif bagi pembukaan lapangan pekerjaan baru dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Di mana setelah banyaknya

ketertarikan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara terhadap nuansa alami pedesaan. (Sutarto, dkk, 2018:). Soleh (2017) mendefinisikan potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian (Noor, 2018) potensi lokal adalah kemampuan/ kekuatan/ daya yang dimiliki oleh suatu daerah atau tempat yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat/keuntungan bagi suatu daerah. Akan tetapi keanekaragaman dan potensi belum mampu membebaskan Indonesia dari masalah kemiskinan.

Kepala kampung Wasur hendaknya senantiasa memotivasi masyarakat untuk memiliki rasa kebersamaan agar masyarakat bisa berpandangan bahwa kampung adalah milik kita bersama, dan masyarakat tidak menuntut hak pembangunan tetapi kewajiban masyarakat adalah turut berpartisipasi dalam semua program pembangunan dengan menggerakkan semua potensi lokal yang dimiliki masyarakat karena semua potensi baik potensi alam maupun potensi masyarakat itu sendiri jika dikembangkan dengan baik dan bijaksana agak mendongkrak percepatan pembangunan kampung.

Sormin (2021), mengemukakan bahwa potensi lokal yang dimiliki papua sangat beragam akan tetapi potensi ini belum banyak dikembangkan. Dalam sebuah kampung diperlukan kerja sama yang menyeluruh antara semua elemen masyarakat sehingga proses pembangunan kampung dapat berjalan dengan lancar dan mampu menghadirkan perubahan kearah yang lebih baik didalam kampung.

2. Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya.

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapati dari hasil wawancara dengan berbagai informan tentang indikator melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya bahwa kepala kampung Wasur belum sepenuhnya menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya selaku kepala kampung dimana selama ini kepala Kampung Wasur jarang berada di kantor sehingga agak sulit untuk menjalankan tugasnya dalam urusan-urusan pemerintah kampung baik urusan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat maupun urusan lainnya yang dipercayakan kepadanya termasuk urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan tugas pelayanan.

Dalam mengembangkan potensi di suatu desa mengutamakan perencanaan yang matang dan tepat guna serta efektif dan juga efisien. Hal tersebut juga tidak lepas dari peran masyarakat dan pemerintah yang saling bahu-membahu dalam mengembangkan potensi desa. Secara umum tujuan dari adanya pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong kemandirian masyarakat yang ada di desa tersebut melalui pemberdayaan masyarakat seperti

halnya mengadakan pelatihan, inovasi alat baru, sosialisasi tentang cara pengolahan suatu produk dll. Tentunya hal tersebut demi kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

Menurut Danin (2004) Kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung di wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Hamalik (2001) Seorang pemimpin dalam melaksanakan peran-peran kepemimpinan antara lain: Peran sebagai katalisator, seorang pemimpin harus menumbuhkan pemahaman dan kesadaran orang-orang yang dipimpinya supaya yakin bahwa tindakan yang dia lakukan adalah untuk kepentingan semua orang.

3. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintah kampung

Koordinasi merupakan usaha untuk menciptakan keadaan yang serasi, selaras dan seimbangan. Kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat ketegantungan dari tiap satuan pelaksanaan dalam suatu organisasi. Tingkat koordinasi yang kurang berjalan akan membuat sebuah organisasi akan tidak efektif dalam menjalankan tugas dan perannya.

Berdasarkan hasil penelitian tentang indikator melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan kampung bahwa proses koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bahwa proses koordinasi kepala Kampung Wasur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di wilayah pemerintahan kampung belum berjalan dengan baik, sehingga berdampak kepada pelaksanaan pembangunan kampung dan pelayanan kepada masyarakat kampung menjadi tidak efektif. Factor yang memicu kurang berjalannya aspek koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kampung Wasur antara lain kepala kampung dan aparatur kampung yang lainnya jarang berada di kantor kampung, karena kantor kampung tidak hanya sebagai bangunan fisik pemerintahan kampung, tetapi kantor kampung sebagai wadah di mana para aparat kampung berkumpul untuk saling bertukar pikiran dan saling koordinasi dalam urusan-urusan pembangunan kampung dan pelayanan kepada masyarakat. Aspek lain masih lemahnya aparat Kampung Wasur terhadap pemahaman akan tugas dan fungsinya. Di sisi lain kantor jarang di buka aktifitas pelayanan administrasi kampung di lakukan dari rumah aparat kampung.

Penyelenggaraan Pemerintahan kampung tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Koordinasi yang baik antar Aparatur kampung. Pemerintahan kampung merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat kampung merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan kampung merupakan sub sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Livingstone dalam Sutarto (2002) koordinasi merupakan antar hubungan berbagai faktor organisasi. Tidak sukar mengorganisasikan kegiatan tunggal tetapi untuk mengorganisasikan macam-macam kegiatan didalam ketunggalan adalah merupakan

pencapaian yang sukar. Koordinasi membuat organisasi baik. Ini adalah suatu sistem keseimbangan dan kontrol, tantangan dan tanggapan, yang ada diantaranya dan diantara satuan-satuan dalam organisasi. Selanjutnya Hick dalam Sutarto (2002) mengatakan prinsip organisasi menerangkan bahwa pelaksanaan organisasi itu efektif apabila semua orang dan sumber disinkronkan, diseimbangkan dan diberikan pengarahan. Koordinasi juga merupakan untuk mendapatkan sinkronisasi usaha yang berpangkal pada waktu dan tata urutan pelaksanaan pekerjaan.

Pendapat yang lain juga disampaikan oleh Pendapat lain dari Ferland dalam Sutarto (2002) yang mengatakan koordinasi adalah proses dimana pimpinan mengembangkan pola yang teratur dari usaha kelompok diantara para bawahannya dan kepastian kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama. Selanjutnya menurut Fayol dalam Syafiie (2006) mengatakan koordinasi adalah mengikat bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha.

Haimer dalam Sutarto (2002) koordinasi ada untuk menyempurnakan banyak usaha agar pencapaian tujuan efektif. Koordinasi memungkinkan kesatuan usaha mental dan fisik dalam bermacam-macam sikap karena menciptakan kelebihan usaha yang dikoordinasikan pada sejumlah individu dari para peserta. Selanjutnya menurut Siagian (2008) koordinasi adalah pengaturan tata hubungan usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Sementara menurut Hasibuan (2009) mendefinisikan koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan unsur-unsur manajemen (*man, money, material, machine, methode, market*) dan pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Handoko (2003) mengatakan koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Hal ini menekankan bahwa tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Mengacu para rumusan koordinasi dari beberapa pendapat teori di atas dapat menunjukkan bahwa pola koordinasi penting dilakukan sebagai sebuah rumusan untuk menyelaraskan kebutuhan Masyarakat dengan kesediaan sumber daya yang ada, serta menyelaraskan program antara pemerintah lebih tinggi dengan program pemerintah lebih rendah dalam hal ini pemerintah desa atau kampung. Sehingga dalam kaitan dengan penelitian ini bahwa kepemimpinan kepala Kampung Wasur dalam penyelenggaraan pemerintah Kampung, harusnya penting membangun koordinasi baik secara internal yakni koordinasi dengan aparat kampung yang ada dan juga bamuskam sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan kampung baik dalam urusan pelayanan kepada masyarakat maupun urusan pembangunan kampung pada umumnya dapat bercalan dengan baik. Sementara koordinasi secara eksternal dimana kepala kampung harusnya berkoordinasi dengan pemerintah yang ada di atasnya antara lain melalui Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Masyarakat

Kampung di Kabupaten Merauke terkait dengan program pembangunan, anggaran pembangunan, dan juga penyusunan laporan pertanggung jawaban hasil dari program pembangunan. Untuk menunjang hal itu maka penting diadakan pendampingan dan pelatihan bagi kepemimpinan kepala kampung dan aparat kampung agar pembangunan kampung dapat berjalan dengan baik dan tetap dilandasi pada aturan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung khususnya di Kampung Wasur ditemukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya rendahnya tingkat kesadaran kepala kampung dan aparat kampung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang berdampak langsung pada partisipasi masyarakat semakin menurun, di sisi lain pengetahuan kepala kampung yang masih kurang dan kurang kedekatan kepala kampung dengan masyarakat kampung, hal ini juga berdampak langsung pada proses pembangunan yang sudah direncanakan.

Hal ini senada dengan pendapat dari Okta Hendrik (2013) menegaskan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai kepala desa adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberi atau menyumbangkan sesuatu untuk desanya sendiri baik berupa fisik, dana maupun sumbangan pendapat atau pikiran. Terkadang setiap keputusan yang diambil tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut disebabkan karena adanya pengaruh-pengaruh dari luar yang menginginkan keputusan tersebut diubah. Faktor penghambat yang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa adalah kurangnya pengetahuan dan kedekatan yang terjalin antara Kepala Desa dengan masyarakat. Terdapat sikap acuh tak acuh mengenai target yang akan dicapai sehingga program yang ingin di jalankan tidak berjalan dengan baik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai jawaban terhadap rumusan tujuan penelitian ini bahwa: kepemimpinan kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung Di Kampung Wasur Distrik Merauke belum berjalan secara efektif dalam menjalankan roda pemerintahan kampung. Hal ini terlihat dari Indikator menggerakkan potensi masyarakat bahwa kepala kampung dalam menggerakkan potensi kampung dan potensi Masyarakat kampung hanya sebatas pada pemberina pelatihan yang sifatnya terbatas baik dari segi waktu dan juga biaya, karena selama ini pelatihan hanya ditujukan kepada petani padi dan juga masyarakat pengelolah sarang semut namun tidak rutin dilakukan. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indikator Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya bahwa Kepala kampung Wasur belum sepenuhnya mejanjalankan tugas dan taggung jawab yang diberikan kepadanya selaku kepala kampung dimana selama ini kepala Kampung Wasur jarang berada di kantor sehingga agak sulit untuk menjalankan tugasnya dalam urusan-urusan pemerintah kampung baik urusan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat maupun urusan lainnya yang

dipercayakan kepadanya termasuk urusan pembangunan. Indikator Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintah kampung bahwa Kepala Kampung masih kurang melakukan koordinasi pembangunan ditingkat kampung dengan belum mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya pembangunan bersama lembaga kemasyarakatan lainnya mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang ada di tingkat Kampung wasur. Proses koordinasi kepala Kampung Wasur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di wilayah pemerintahan kampung belum berjalan dengan baik, sehingga berdampak kepada pelaksanaan pembangunan kampung dan pelayanan kepada masyarakat kampung menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hasil kesimpulan dari temuan penelitian di atas, maka saran yang diberikan sebagai hasil rekomendasi penelitian antara lain: Untuk Kepala Kampung dan aparatur kampung agar lebih peka dalam memahami kondisi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat agar bisa dijadikan potensi yang bisa dikembangkan untuk mendukung program-program Pembangunan kampung secara keseluruhan. Bagi Masyarakat kampung agar lebih proaktif dalam menjalin hubungan kerja sama dengan kepala kampung dan aparat kampung yang lainnya, agar semua program Pembangunan baik program pemerintah pusat, kabupaten maupun program Pembangunan dari hasil musawarah kampung bisa terealisasi dengan baik dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Bagi bamuskam Kampung agar lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan perannya untuk mengawasi kepala kampung dan aparat kampung dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Merauke melalui instansi terkait agar terus melakukan pembinaan, pelatihan, dan juga pendampingan bagi pemerintah kampung dan masyarakat kampung agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kampung yang lebih bertanggung jawab dan masyarakat kampung yang lebih produktif. Bagi praktisi agar ikut ambil bagian secara aktif dalam perumusan konsep Pembangunan yang lebih konstruktif yang dilandasi pada aspek potensi ekonomi dan potansi sosial masyarakat yang ada di kampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswori & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan, (2004). *Motivasi, kepemimpinan dan efektifitas kelompok*. Jakarta; PT. Rineka Cipta
- Hamalik, Oemar. (2001). *Pengembangan sumberdaya manusia manajemen pelatihan Ketatanegaraan; pendekatan terpadu jakarta* : Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta
- Handoko T. Tani, (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPEF
- Noor, Martadani. (2018). *Model Pemberdayaan Potensi Lokal dan Pengembangan Desa Wisata Brayut*. 2–3.

- Okta Hendrik, (2013). Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau”, e .Journal ilmu pemerintahan 1, No.2 (2013): h. 468
- Triantoro Safaria. (2004). Kepemimpinan. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. Jurnal Sungkai, 5(1), 32– 52
- S. Sormin, F. ., and Y. Tembang (2021), “Menakar Kearifan Lokal Suku Malind Sebagai Model Penanaman Ecoliterasi Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Merauke”, Jurnal Education And Development, vol. 9, Nomor 4, pp. 565-569, Nov. 2021
- Siagan, Sondang P. 1980. Administrasi Pembangunan. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Sutarto, J., Mulyono, S. E., Nurhalim, K., & Pratiwi, H. (2018). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kecakapan Hidup Berbasis Keunggulan Lokal Desa Wisata Mandiri Wanurejo Borobudur Magelang. 35, 27–40.
- Sugiyono, P. D. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Alfabeta, Ed.). Bandung: Alfabeta.